

**ANALISIS KINERJA FUNGSI PERKOTAAN
SURUH DAN TENGARAN SEBAGAI PUSAT
PENGEMBANGAN KAWASAN SELATAN
KABUPATEN SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RISKY DWI AFRIADI

NIM 12020110130066

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Risky Dwi Afriadi
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110130066
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA FUNGSI
PERKOTAAN SURUH DAN TENGARAN
SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN
KAWASAN SELATAN KABUPATEN
SEMARANG**

Dosen Pembimbing : Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP

Semarang, 14 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

(Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP)

NIP 19610416 198710 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Risky Dwi Afriadi
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110130066
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA FUNGSI
PERKOTAAN SURUH DAN TENGARAN
SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN
KAWASAN SELATAN KABUPATEN
SEMARANG**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 28 Agustus 2014

Tim Penguji

1. Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP (.....)
2. Dr. Nugroho SBM, MSP. (.....)
3. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Risky Dwi Afriadi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **"Analisis Kinerja Fungsi Perkotaan Suruh dan Tenganan Sebagai Pusat Pengembangan Kawasan Selatan Kabupaten Semarang"**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

Risky Dwi Afriadi

NIM : 12020110130066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang
Menciptakan” (Al-Alaq:1)**

**“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat” (Al-Mujadalah: 11)**

“Man Jadda Wajada”

(Barang Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil)

“Man Shabara Zhafira”

(Barang Siapa Yang Bersabar Pasti Beruntung)

diambil dari Novel Trilogi Negeri 5 Menara

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK
KELUARGA TERCINTA,
ALMAMATER UNIVERSITAS DIPONEGORO, DAN
MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG YANG PERMAI**

ABSTRACT

This study based on inequality occurred in Semarang Regency. One of efforts by the government is decreasing concentration of activity in north and center area of the regency i.e. Ungaran and Ambarawa. Developing of south area done by determining urban area in Suruh and Tenganan as center of development. This area selected become location of study because still regions lagging behind indicated from regional income, accessibility, and completeness of public facilities.

The aim of this study is to analyze the performance of urban area in Suruh and Tenganan as center of development in south area of Semarang regency. In this study, performance of city functions measured by availability of public facilities and spatial interactions of people in south area. The data that used in this study are availability of public facilities and results of interviews with the people and governments.

The results of this study are the availability of public facilities in south area is adequate for economy and religious duties. However, the number of the health facility (except puskesmas) is less than it's necessary. Moreover, spatial interaction analysis shows that function of Suruh and Tenganan urban area as the center of development haven't been able to become pole of attraction in south area. People prefer to interact with other regions such as Salatiga and Boyolali for utilization of public facilities.

Keywords: performance of city functions, center of development area, public facilities, south area

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada kesenjangan antarkawasan yang terjadi di Kabupaten Semarang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bappeda yaitu mengurangi konsentrasi kegiatan di Kawasan Utara dan Tengah seperti Ungaran dan Ambarawa dengan cara mengembangkan Kawasan Selatan melalui penetapan perkotaan Suruh dan Tengaran sebagai pusat pengembangan. Kawasan ini dipilih menjadi lokasi studi karena masih tertinggal dari kawasan lain, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pendapatan perkapita, aksesibilitas, dan faktor kelengkapan fasilitas umum.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja fungsi perkotaan Suruh dan Tengaran sebagai pusat pengembangan Kawasan Selatan Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini, kinerja fungsi kota diukur dengan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dan melalui interaksi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu ketersediaan fasilitas publik dan data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat dan pihak pemerintah.

Hasil penelitian ini adalah ketersediaan fasilitas pelayanan di Kawasan Selatan sudah memadai untuk bidang perekonomian dan peribadatan. Namun, untuk fasilitas kesehatan jumlahnya masih kurang kecuali puskesmas. Selanjutnya analisis interaksi kewilayahan menunjukkan bahwa fungsi perkotaan Suruh dan Tengaran sebagai pusat pengembangan belum mampu menjadi penarik bagi masyarakat di Kawasan Selatan. Masyarakat lebih memilih berinteraksi dengan daerah lain seperti Salatiga dan Boyolali dalam menggunakan fasilitas pelayanan.

Kata Kunci: kinerja fungsi kota, pusat pengembangan kawasan, fasilitas publik, kawasan selatan

KATA PENGANTAR

Skripsi ini tidak akan terbit, tanpa izin Allah SWT. Karena itu, tiada hentinya penulis bersyukur diberikan oleh-Nya kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan kemudahan dalam segala proses studi di Universitas Diponegoro, sembari berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk untuk langkah hidup penulis selanjutnya. Penulis teristimewa mengucapkan terimakasih kepada **Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dengan segala ketelitian dan kesabaran sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS KINERJA FUNGSI PERKOTAAN SURUH DAN TENGARAN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN SELATAN KABUPATEN SEMARANG” ini dapat terselesaikan. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, dukungan, kerjasama dari berbagai pihak baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro beserta seluruh staf pengajar, staf administrasi, tata usaha, perpustakaan, beserta staf keamanan dan pihak-pihak fakultas yang lain yang selama ini membantu proses perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
2. Jajaran pimpinan beserta seluruh dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Terimakasih atas segala kemudahan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Nugroho SBM, MSP dan Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, masukan, dan tambahan ilmu kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam kegiatan akademis selama penulis belajar di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

5. Keluarga tercinta. Ayahanda Sugeng Rihadi dan Ibunda Rustinah atas kepercayaan, dukungan, fasilitas, serta atas segala doa dan kesabaran. Kakak Riska Eky Afriani atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga dalam keadaan apapun kita senantiasa bersyukur dan bersabar.
6. Petugas Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data.
7. Petugas perpustakaan Jurusan Planologi Undip yang telah membantu penulis dalam memperoleh referensi.
8. Jajaran pemerintah daerah Kabupaten Semarang dan Bappeda setempat. Khususnya kepada Bapak Sutrisno (Kepala Subbina Pertanian Bagian Perekonomian Pemkab), Bapak Gunawan Wibisono (Staf Ahli Bupati), dan Bapak Edi (Bidang Pengembangan Wilayah Bappeda).
9. Seluruh Camat dan para staf kecamatan di Kawasan Selatan Kabupaten Semarang, secara khusus kepada Bapak Mawardi dan Bapak Khabib Sholeh (Kec. Bancak), Bapak Handoko (Bringin), Bapak Moh. Sigit (Pabelan), Bapak Purwadi (Getasan), Bapak Rinif Budi dan Bapak Toto (Kaliwungu), Bapak Wahyudi, Bapak Yitno dan Ibu Nunik (Susukan), Bapak Supriyanto dan Bapak Didik (Tengaran), dan Ibu Lita (Suruh).
10. Para kontributor skripsi : tim survei, pengamatan lapangan beserta pembuatan peta.
 - Maman Eka Kardiman dari Jurusan Planologi Undip yang telah membantu dalam pembuatan peta.
 - Teman-teman tim survei pendahuluan: Capt. Eka, Yohanes, dan Danu Dewantoro. Terimakasih atas tenaga dan waktu yang telah diluangkan ditengah kesibukan masing-masing.
 - Mc. Khuzaironi yang turut mendampingi setiap perjalanan di lokasi studi dan mendokumentasikan setiap momen. *Massive thankyou!*
11. Seluruh masyarakat Kabupaten Semarang dan segenap responden yang telah membantu penulis dalam memperoleh data, informasi dan akomodasi selama di lapangan.

12. Keluarga besar IESP 2010, terimakasih atas kebersamaan dan kekompakannya. Secara khusus teman-teman IYIK FAMS, JARPIM, TIM ESDAL KENDAL CERIA, dan GRIM! (pimpinan Ian Menkeu). Senang bisa menjadi bagian dari kalian semua.
13. Teman-teman IESP yang telah meluangkan waktu menghadiri acara ujian skripsi penulis dan memberi dukungan.
14. Teman-teman KKN Tim II Tahun 2013 Desa Bumiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Terimakasih atas kebersamaannya dalam suka dan duka. Semoga kita semua dapat berjumpa dan berkumpul kembali.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah dari awal sampai akhir.

Akhir kata penulis ikut mendoakan semoga semua amal kebaikan anda sekalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman dan memperkaya khasanah keilmuan.

Semarang, 14 Agustus 2014

Risky Dwi Afriadi
NIM. 12020110130066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan dan Kegunaan	24
1.4 Sistematika Penulisan.....	25
 BAB II TELAAH PUSTAKA	26
2.1 Landasan Teori	26
2.1.1 Wilayah sebagai Suatu Konsep.....	26
2.1.2 Pengembangan Wilayah.....	27
2.1.3 Strategi Pengembangan Wilayah.....	28
2.1.4 Pengertian Kota.....	29
2.1.5 Fungsi Kota.....	30
2.1.6 Analisis Wilayah Pengaruh.....	33
2.1.7 Fasilitas yang Dibutuhkan dalam Suatu Kota Kecamatan.....	35
2.1.8 Teori Lokasi.....	36
2.1.9 Teori Tempat Pusat.....	37
2.1.10 Pusat Pertumbuhan.....	37
2.1.11 Interaksi Keruangan.....	41
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
2.3 Kerangka Pemikiran	48
 BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	50
3.2. Jenis dan Sumber Data	51
3.3. Metode Pengumpulan Data	53
3.4. Metode Analisis	53
 BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	60
4.1. Kajian Umum Wilayah Studi.....	60
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Semarang.....	60

4.1.2	Gambaran Umum Kawasan Selatan.....	62
4.2.	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan di Kawasan Selatan.....	64
4.2.1	Fasilitas Kesehatan.....	64
4.2.2	Fasilitas Perekonomian.....	67
4.2.3	Fasilitas Peribadatan	68
4.3.	Prasarana Fisik Perkotaan Suruh dan Tenganan	70
4.3.1	Fasilitas Transportasi.....	70
4.3.2	Fasilitas olahraga dan Taman Terbuka	75
4.4.	Interaksi Wilayah di Kawasan Selatan	76
4.4.1	Interaksi Wilayah Kecamatan Bancak.....	76
4.4.2	Interaksi Wilayah Kecamatan Bringin.....	82
4.4.3	Interaksi Wilayah Kecamatan Pabelan.....	88
4.4.4	Interaksi Wilayah Kecamatan Getasan.....	93
4.4.5	Interaksi Wilayah Kecamatan Kaliwungu.....	99
4.4.6	Interaksi Wilayah Kecamatan Susukan.....	904
4.4.7	Interaksi Wilayah Kecamatan Suruh.....	109
4.4.8	Interaksi Wilayah Kecamatan Tenganan.....	114
4.5.	Relevansi Teori dan Temuan Penelitian	120
BAB V	PENUTUP.....	122
5.1.	Simpulan	122
5.2.	Keterbatasan.....	123
5.3.	Saran	123
	DAFTAR PUSTAKA	125
	LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

1.1	PDRB Kabupaten Semarang ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011.....	4
1.2	Data Perkiraan PDRB ADHK 2000 Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2011.....	6
1.3	Jumlah Perusahaan/Industri Besar Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang.....	8
1.4	Data Perkiraan PDRB Perkapita ADHK 2000 Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2011.....	10
1.5	Hasil Analisis Tipologi Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2006.....	13
1.6	Hasil Analisis Tipologi Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2011.....	13
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	47
3.1	Metode Analisis Penelitian.....	59
4.1	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Kawasan Selatan Kabupaten Semarang Tahun 2012.....	62
4.2	Tingkat Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kawasan Selatan.....	66
4.3	Tingkat Kebutuhan Fasilitas Perekonomian di Kawasan Selatan.....	67
4.4	Tingkat Kebutuhan Fasilitas Peribadatan di Kawasan Selatan.....	69

DAFTAR GAMBAR

1.1	Letak Strategis Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah.....	3
1.2	Peta Administratif Kabupaten Semarang	7
1.3	Peta Pembagian SWP di Kabupaten Semarang.....	16
1.4	Analisis Tipologi Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2011.....	17
1.5	Konsentrasi Kegiatan Ekonomi di Kawasan Utara.....	18
1.6	Konsentrasi Kegiatan Ekonomi di Kawasan Tengah.....	19
1.7	Konsentrasi Kegiatan Ekonomi di Kawasan Selatan.....	20
2.1	Tiga Elemen Pokok Pengembangan Wilayah.....	29
2.2	Diagram Sistem Perkotaan.....	31
2.3	Luas Jangkauan <i>Range</i> dan <i>Threshold</i>	34
2.4	Kerangka Pemikiran.....	53
4.1	Peta Kawasan Selatan Kabupaten Semarang.....	63
4.2	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Semarang.....	64
4.3	Visi dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Semarang.....	65
4.4	Kompleks Pertokoan di Dekat Pasar Kembang Sari, Tenganan.....	68
4.5	Masjid Besar di Kecamatan Tenganan.....	69
4.6	Sarana Transportasi di Kabupaten Semarang.....	71
4.7	Sub Terminal Suruh dan Sub Terminal Sruwen.....	72
4.8	Terminal Bayangan di Dekat Sub Terminal Sruwen.....	73
4.9	Infrastruktur Jalan di Kabupaten Semarang.....	74
4.10	Lapangan Kecamatan Tenganan.....	75
4.11	Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bancak.....	78
4.12	Pasar Kalimaling dan Akses Transportasi di Kecamatan Bancak.....	80
4.13	Peta Interaksi Wilayah Kecamatan Bancak.....	81
4.14	Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Bringin.....	83
4.15	Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Bringin.....	84
4.16	Pasar Bringin.....	85
4.17	Peta Interaksi Wilayah Kecamatan Bringin.....	87

4.18	Puskesmas Pabelan dan Kawasan Pertokoan di Pabelan.....	90
4.19	Peta Interaksi Wilayah Kecamatan Pabelan.....	92
4.20	Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Getasan.....	95
4.21	Pasar Getasan.....	96
4.22	Peta Interaksi Wilayah Kecamatan Getasan.....	98
4.23	Fasilitas Pendidikan yang ada di Kecamatan Kaliwungu.....	100
4.24	Pasar Desa di Kecamatan Kaliwungu.....	102
4.25	Peta Interaksi Wilayah Kecamatan Kaliwungu.....	103
4.26	Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Susukan.....	105
4.27	Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Susukan.....	106
4.28	Suasana Jalan Raya Kecamatan Susukan.....	107
4.29	Peta Interaksi Wilayah Kecamatan Susukan.....	108
4.30	Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Suruh.....	110
4.31	Pasar dan Puskesmas Rawat Inap Suruh.....	111
4.32	Peta Interaksi Wilayah Kecamatan Suruh.....	113
4.33	Kantor Kecamatan Tenganan.....	114
4.34	Puskesmas Tenganan.....	116
4.35	Pasar Kembang Sari Kecamatan Tenganan.....	117
4.36	Peta Interaksi Wilayah Kecamatan Tenganan.....	119

DAFTAR LAMPIRAN

A	DATA-DATA PENELITIAN.....	128
B	PETA-PETA ADMINISTRATIF.....	137
C	DOKUMENTASI PENELITIAN.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi (Rahardjo, 2005). Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang tinggi (*GDP Oriented*) seperti yang telah ditempuh beberapa dasawarsa lalu memperlihatkan keberhasilan secara memuaskan di berbagai bidang pembangunan, yang diukur dalam tingkat pertumbuhan ekonomi riil telah memperlihatkan peningkatan secara terus menerus. Namun, pertumbuhan yang tinggi itu telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan atau ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan antar daerah (yang maju dan tertinggal).

Ketimpangan pembangunan yang semakin tinggi tersebut perlu diatasi dengan konsep pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh wilayah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menyeleraskan antara pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Disamping upaya meningkatkan pembangunan sektor-sektor yang masing-masing berlangsung di wilayah, harus pula ditingkatkan pembangunan wilayah-wilayah yang masing-masing mencakup berbagai sektor. Pentingnya pendekatan regional dalam pembangunan ditegaskan oleh Rahardjo Adisasmita (2005:9) sebagai berikut :

“Pendekatan sektoral mendekati pembangunan nasional melalui kegiatan usaha demi kegiatan usaha, yang dikelompokkan ke dalam sektor dan subsektor. Pendekatan regional bertolak pada kenyataan bahwa setiap kegiatan usaha

terkait pada wilayah, selalu memanfaatkan dan menempati ruang wilayah. Disamping itu, dimensi lokal atau lokalitas harus diperhitungkan dalam pendekatan pembangunan.”

Pembangunan berbasis wilayah yaitu pembangunan ekonomi yang melibatkan aspek ruang dalam pemanfaatan wilayah yang mencakup lokasi dan dimensi wilayah (Rahardjo, 2005). Penerapan konsep “Wilayah Pembangunan” merupakan sebuah media untuk merumuskan strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Konsep ini menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat pembangunan dan wilayah-wilayah lain sebagai satelitnya. Penerapan Wilayah Pembangunan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah yang berbeda-beda untuk meningkatkan pembangunan ekonomi (Gultom, 2013). Potensi daerah yang dapat dikembangkan dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki letak yang strategis dan kegiatan perekonomian yang berkembang pesat, sehingga membutuhkan pengembangan wilayah-wilayah dalam kabupaten untuk menopangnya. Letaknya yang berada di jalur penghubung Kota Semarang dengan kota besar lain seperti Solo dan Yogyakarta menjadikannya sebagai daerah transit bagi kendaraan yang melintas. Hal ini tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi wilayah seperti bermunculannya usaha-usaha masyarakat seperti rumah makan, tambal ban, kios oleh-oleh, dan lain sebagainya.

Gambar 1.1
Letak Strategis Kabupaten Semarang di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Bappeda Kabupaten Semarang, diolah

Tabel 1.1
PDRB Kabupaten Semarang Berdasarkan Harga Konstan Tahun
2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2011 (dalam juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha (Sektor)	2009		2010		2011	
		PDRB	Share	PDRB	Share	PDRB	Share
1.	Pertanian	693.711	13,1%	709.057	12,8%	738.896	12,6%
2.	Pertambangan dan Penggalian	6.455	0,1%	6.816	0,1%	6.852	0,1%
3.	Industri Pengolahan	2.467.117	46,5%	2.585.787	46,5%	2.729.084	46,4%
4.	Listrik, Air dan Gas	46.168	0,9%	50.347	0,9%	54.862	0,9%
5.	Konstruksi	191.826	3,6%	206.231	3,7%	225.432	3,8%
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.143.057	21,6%	1.210.039	21,8%	1.274.426	21,7%
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	115.644	2,2%	119.697	2,2%	128.240	2,2%
8.	Keuangan, Jasa perusahaan dan Persewaan	186.583	3,5%	198.497	3,6%	207.481	3,5%
9.	Jasa -jasa	449.891	8,5%	474.080	8,5%	511.919	8,7%
	TOTAL	5.300.723	100%	5.560.552	100%	5.877.192	100%
	Pertumbuhan Ekonomi	4,37%		4,90%		5,69%	

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2013

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan perekonomian Kabupaten Semarang melalui nilai PDRB tiap sektor yang menunjukkan kontribusi masing-masing sektor PDRB. Kontribusi dalam PDRB tersebut akan menentukan potensi yang dimiliki wilayah setempat. Melalui sektor unggulan Kabupaten Semarang yang dinamakan "INTANPARI" yaitu industri, pertanian, dan pariwisata dapat dilihat perekonomian Kabupaten Semarang yang didominasi oleh sektor industri, sektor pertanian serta sektor perdagangan, restoran, dan hotel (hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Bagian Perekonomian Pemerintah

Kabupaten Semarang pada 7 Februari 2014). Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi nilai PDRB untuk masing-masing sektor tersebut yang mencapai di atas 10 persen dari total nilai PDRB untuk tiap tahun. Perekonomian Kabupaten Semarang didominasi oleh sektor industri pengolahan yang kontribusi sektoralnya mencapai sekitar 46 persen. Kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sekitar 21 persen. Selanjutnya sektor pertanian menyumbang sekitar 12-13 persen. Selain ketiga sektor tersebut, kontribusi sektor-sektor lain di bawah 10 persen.

Pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, terlihat nilai PDRB sebesar Rp 5,3 Trilyun. Kemudian angka tersebut meningkat menjadi Rp 5,3 Trilyun atau naik sebesar 4,9 persen. Selanjutnya pada tahun 2011 PDRB naik sebesar 5,69 persen atau mencapai Rp 5,877 Trilyun. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum tersebar merata antarwilayah di Kabupaten Semarang. Hal tersebut antara lain karena kegiatan yang cenderung berorientasi di kawasan-kawasan tertentu seperti Ungaran, Bawen, dan Ambarawa. Kepadatan dan kemacetan di kawasan tersebut harus dikurangi untuk memperlancar arus perekonomian. Daerah yang sedang berkembang direncanakan oleh pemerintah sebagai pusat pertumbuhan dan diharapkan perkembangan kotanya mampu menyebar ke daerah sekitarnya.

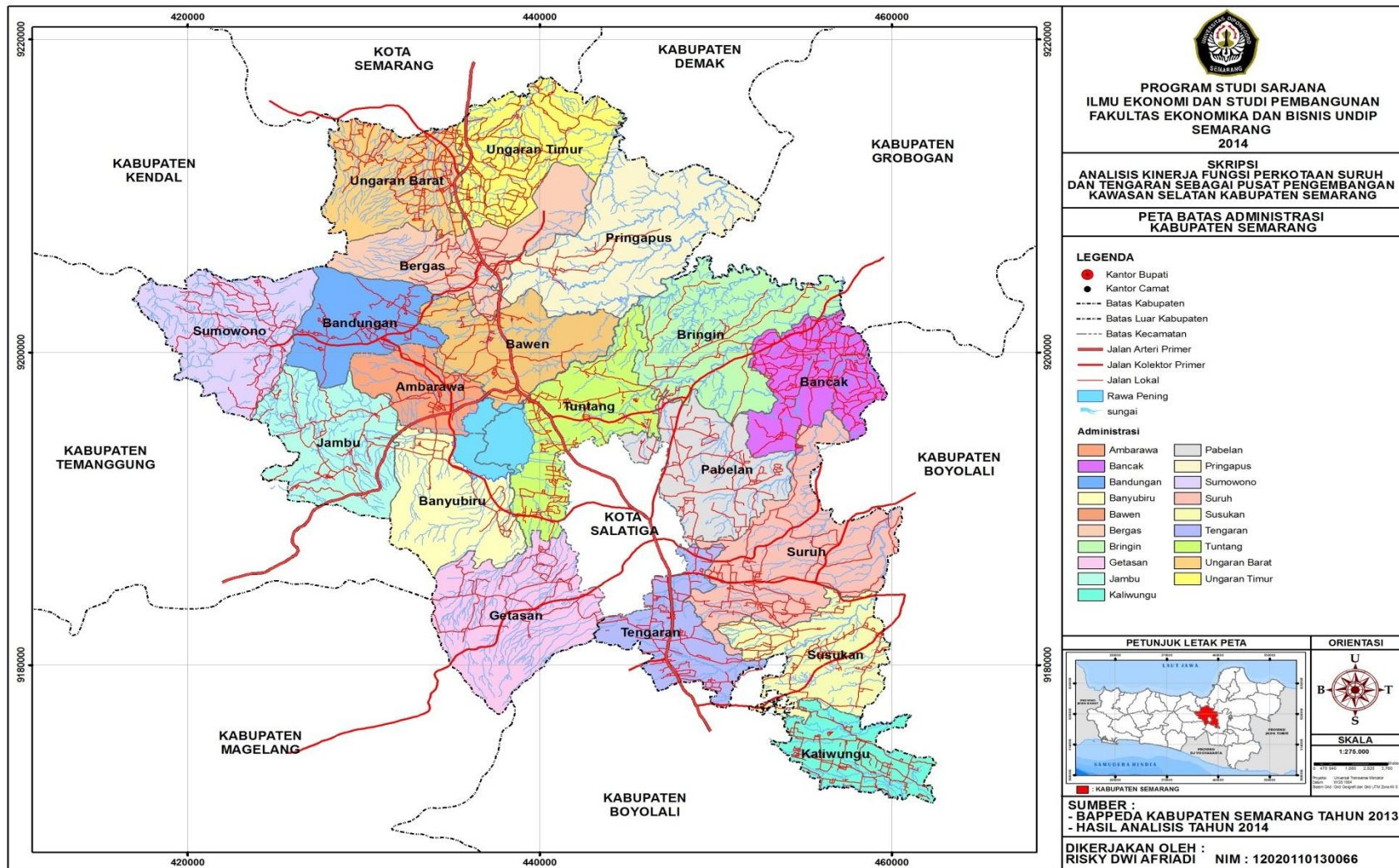
Menurut Tambunan (2009), salah satu indikator yang dapat digunakan dalam melihat ketimpangan antarwilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan indikator tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan

pembangunan antarwilayah di Kabupaten Semarang. Perekonomian Kabupaten Semarang bertumpu pada beberapa kecamatan. Hal ini dikarenakan pada kecamatan-kecamatan tersebut memiliki kontribusi terhadap PDRB yang jauh lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Tabel 1.2
Data PDRB ADHK 2000 Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2011 (dalam ribu rupiah)

No.	Kecamatan	2010	2011	Rata-rata	Share
1	Getasan	158.829.443	186.765.202	172.797.323	3,02%
2	Tengaran	152.719.260	157.905.597	155.312.429	2,72%
3	Susukan	88.430.921	95.499.682	91.965.302	1,61%
4	Kaliwungu	69.352.081	90.413.316	79.882.699	1,40%
5	Suruh	107.879.590	118.464.878	113.172.234	1,98%
6	Pabelan	131.153.404	117.624.784	124.389.094	2,18%
7	Tuntang	107.079.752	111.737.338	109.408.545	1,91%
8	Banyubiru	91.460.083	98.959.370	95.209.727	1,66%
9	Jambu	69.152.931	67.284.689	68.218.810	1,19%
10	Sumowono	106.158.764	115.641.710	110.900.237	1,94%
11	Ambarawa	115.604.549	108.069.931	111.837.240	1,96%
12	Bandungan	112.688.818	127.028.239	119.858.529	2,10%
13	Bawen	1.297.512.028	1.376.668.209	1.337.090.119	23,38%
14	Bringin	92.369.313	89.725.603	91.047.458	1,59%
15	Bancak	59.045.486	63.926.122	61.485.804	1,08%
16	Pringapus	417.666.703	451.633.975	434.650.339	7,60%
17	Bergas	653.714.065	686.549.349	670.131.707	11,72%
18	Ungaran Barat	860.848.252	896.566.573	878.707.413	15,37%
19	Ungaran Timur	868.886.450	916.725.977	892.806.214	15,61%
Kabupaten		5.560.551.893	5.877.190.544	5.718.871.219	100,00%

Sumber : PDRB Kecamatan di Kabupaten Semarang, 2012



Selama tahun 2010-2011, terlihat bahwa Kecamatan Bawen sebagai daerah penyumbang PDRB terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Semarang, dengan kontribusi mencapai 23,38 persen, kemudian Kecamatan Ungaran Timur dan Ungaran Barat dengan 15,61 dan 15,37 persen. Selanjutnya berturut-turut adalah Kecamatan Bergas dan Pringapus dengan 11,72 dan 7,60 persen. Sementara kecamatan-kecamatan yang lain memiliki PDRB di bawah lima kecamatan tersebut dengan kontribusi di bawah 5 persen.

Kontribusi yang tinggi tersebut merupakan sumbangan dari sektor industri pengolahan yang memang menjadi sektor utama dalam perekonomian kabupaten Semarang. Berdasarkan survei lapangan, terdapat beberapa industri besar yang berada di kecamatan-kecamatan tersebut seperti PT. APAC Inti Corpora, PT. Liebra Permana (Bawen), PT. Eka Sandang Duta Prima (Pringapus), kemudian PT. Ara Shoes Indonesia dan PT Inti Semarang Garmino (Bergas), selanjutnya ada PT. Batam Textile Industri, PT. Nissin Biskuit Indonesia, PT. Batam Textile industri, dan PT. Ungaran Sari Garmen (Ungaran Barat dan Timur).

Tabel 1.3
Jumlah Perusahaan/Industri Besar Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Perusahaan
1	Tengaran	1
2	Susukan	3
3	Bawen	3
4	Pringapus	2
5	Bergas	8
6	Ungaran Barat	1
7	Ungaran Timur	5
Total Kabupaten		23

Sumber : Direktori Industri Besar dan Sedang, BPS, 2010

Tabel 1.3 menunjukkan banyaknya jumlah industri besardengan penyerapan lebih dari 1000 tenaga kerja yang ada di Kabupaten Semarang. Jumlah perusahaan paling banyak terdapat di kecamatan Bergas dengan total 8 perusahaan (30 persen) dan Ungaran Timur dengan 5 perusahaan (19 persen). Sedangkan kecamatan-kecamatan yang tidak disebutkan pada tabel tidak memiliki satupun industri besar. Todaro (2006) menyebutkan, salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah yaitu dengan menggunakan PDRB per kapita. PDRB per kapita yang semakin besar menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Selain dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan tersebut, perlu dicermati apakah PDRB per kapita tersebut sudah terdistribusi secara merata atau tidak.

Berdasarkan tabel 1.4, selama tahun 2010-2011 terdapat 5 kecamatan yang memiliki PDRB perkapita di atas rata-rata PDRB perkapita kabupaten sebesar Rp 5.448.638. Lima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bawen dengan rata-rata PDRB perkapita sebesar Rp 24.773.477 atau empat kali lipat lebih besar dibanding PDRB perkapita kabupaten. Kemudian Kecamatan Ungaran Timur dan Ungaran Barat dengan PDRB perkapita sebesar Rp 13.022.734 dan Rp 11.807.800 atau sekitar dua kali lipat lebih besar daripada PDRB perkapita kabupaten, dan urutan selanjutnya yaitu Kecamatan Bergas dan Pringapus sebesar Rp 9.591.748 dan Rp 8.675.431 atau sedikit lebih besar dari PDRB perkapita kabupaten. Sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya memiliki nilai PDRB perkapita di bawah nilai kabupaten.

Tabel 1.4
Data Perkiraan PDRB Perkapita ADHK 2000 Tiap Kecamatan di
Kabupaten Semarang Tahun 2010-2011 (dalam rupiah)

No.	Kecamatan	2010	2011	Rata-rata
1	Getasan	3.308.808	3.857.589	3.583.199
2	Tengaran	2.379.842	2.454.661	2.417.252
3	Susukan	2.050.809	2.210.743	2.130.776
4	Kaliwungu	2.635.157	3.437.376	3.036.267
5	Suruh	1.808.573	1.984.835	1.896.704
6	Pabelan	3.519.385	3.155.933	3.337.659
7	Tuntang	1.771.904	1.838.238	1.805.071
8	Banyubiru	2.272.243	2.449.913	2.361.078
9	Jambu	1.890.354	1.827.047	1.858.701
10	Sumowono	3.573.526	3.876.301	3.724.914
11	Ambarawa	1.983.129	1.848.929	1.916.029
12	Bandungan	2.146.653	2.398.478	2.272.566
13	Bawen	24.131.228	25.415.725	24.773.477
14	Bringin	2.253.743	2.178.228	2.215.986
15	Bancak	2.975.932	3.217.541	3.096.737
16	Pringapus	8.359.185	8.991.677	8.675.431
17	Bergas	9.165.704	10.017.792	9.591.748
18	Ungaran Barat	11.617.385	11.998.214	11.807.800
19	Ungaran Timur	12.739.336	13.306.132	13.022.734
Rata-Rata Kabupaten		5.293.837	5.603.440	5.448.638

Sumber : PDRB Kecamatan di Kabupaten Semarang, 2012

Perbedaan tinggi rendahnya PDRB perkapita antarwilayah dapat mengindikasikan terjadinya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Semarang. Ketimpangan pembangunan yang terjadi antarwilayah di suatu daerah merupakan hal yang wajar terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah (Sitorus, 2012). Menurut Sjafrizal (2012), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang

terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Perbedaan kekayaan daerah ini yang pada akhirnya menimbulkan adanya wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underdeveloped region*).

Douglas C. North dalam Hipotesis Neo-Klasik memunculkan prediksi tentang hubungan tingkat pembangunan ekonomi sebuah negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut Hipotesis Neo-Klasik tersebut, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antarwilayah akan cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai puncak. Kemudian pada saat proses pembangunan tersebut berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antarwilayah tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2012)

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam kegiatan pembangunan daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah (Sitorus, 2012). Menurut Todaro (2006) dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil. Sementara itu menurut Sjafrizal (2012) ketimpangan juga membawa implikasi negatif dan

cenderung mendorong adanya kecemburuan sosial antardaerah yang dapat mengganggu kestabilan perekonomian dan politik.

Analisis Tipologi Daerah merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan antar wilayah (Kuncoro, 2004). Tipologi daerah mengklasifikasikan daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau PDRB perkapita wilayah. Dengan menentukan pertumbuhan ekonomi daerah induk sebagai sumbu horisontal dan PDRB perkapita daerah induk sebagai sumbu vertikal, maka daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu :

1. Daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita daerah itu lebih tinggi daripada wilayah atasnya)
2. Daerah maju tapi tertekan (PDRB perkapita lebih tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada wilayah diatasnya)
3. Daerah berkembang cepat (PDRB perkapita lebih rendah tetapi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada wilayah atasnya)
4. Daerah relatif tertinggal (PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada wilayah atasnya)

Dengan menggunakan data PDRB dan pendapatan perkapita tahun 2006 dan 2011 untuk menganalisis tipologi daerah, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Semarang dapat dibagi menjadi empat klasifikasi. Rentang selama 5 tahun pada data yang digunakan untuk melihat adanya perubahan posisi kecamatan-kecamatan dalam analisis tipologi daerah. Adapun hasil analisis tipologi daerah di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Hasil Analisis Tipologi Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2006

	Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari wilayah kabupaten	Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah kabupaten
PDRB perkapita lebih tinggi dari wilayah kabupaten	Kuadran II Bawen, Pringapus, Bergas	Kuadran I Ungaran
PDRB perkapita lebih rendah dari wilayah kabupaten	Kuadran III Tengaran, Pabelan, Tuntang, Jambu, Ambarawa	Kuadran IV Bancak, Bringin, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Suruh, Banyubiru, Sumowono

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, diolah, 2014

Keterangan : Pada tahun 2006, Kecamatan Bandungan belum terbentuk dan data Kecamatan Ungaran Barat dan Ungaran Timur masih tergabung dalam kecamatan Ungaran.

Tabel 1.6
Hasil Analisis Tipologi Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2011

	Pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari wilayah kabupaten	Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah kabupaten
PDRB perkapita lebih tinggi dari wilayah kabupaten	Kuadran II Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur	Kuadran I Bawen, Pringapus
PDRB perkapita lebih rendah dari wilayah kabupaten	Kuadran III Banyubiru, Sumowono, Bancak, Bandungan	Kuadran IV Bringin, Getasan, Jambu, Susukan, Kaliwungu, Suruh, Tengaran, Pabelan, Tuntang, Ambarawa

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, diolah, 2014

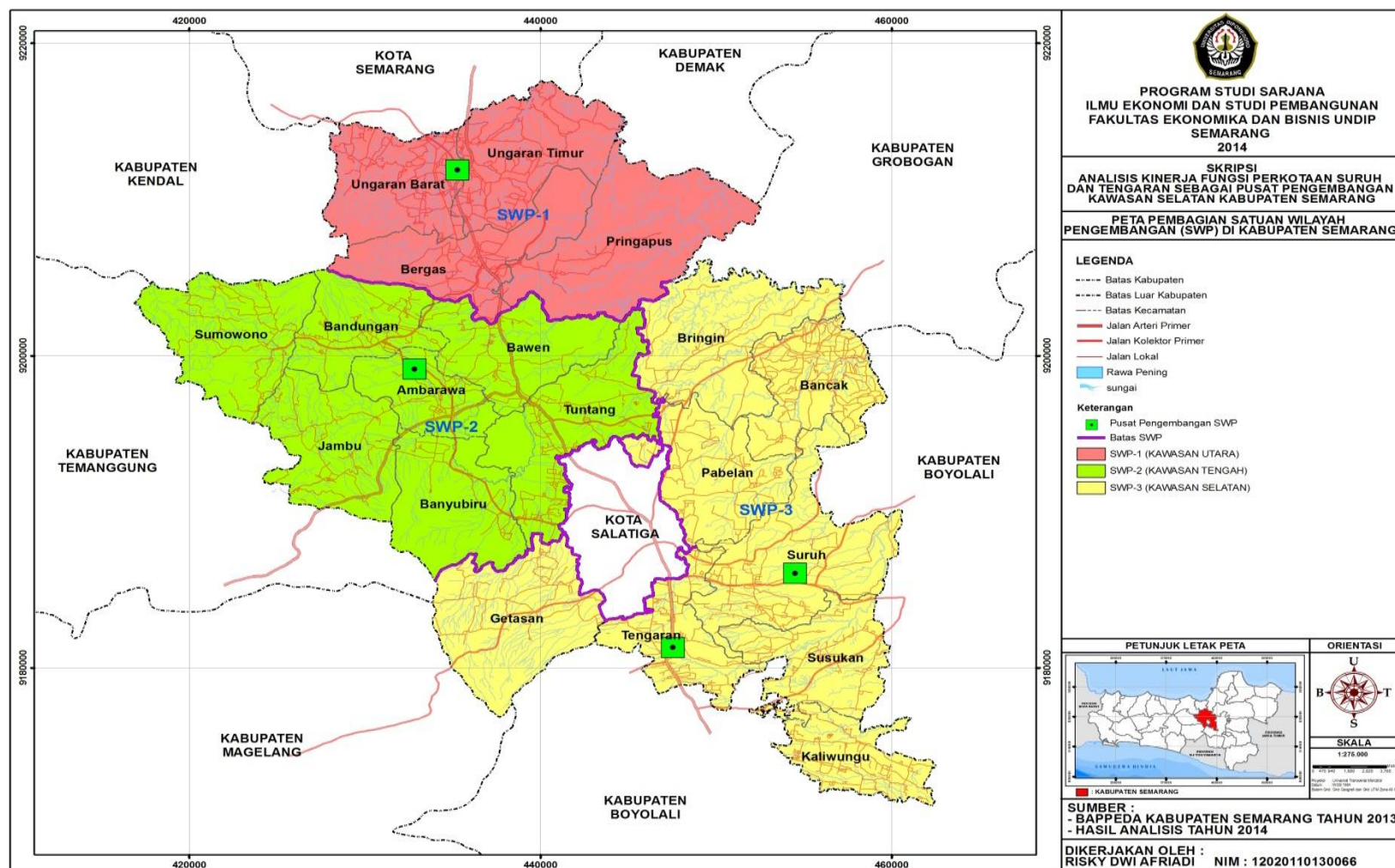
Pada tahun 2006, Kecamatan Ungaran adalah daerah maju. Namun, setelah dimekarkan menjadi Ungaran Barat dan Ungaran Timur pada 2011 menjadi daerah maju tapi tertekan. Sementara itu Kecamatan Bawen dan Pringapus yang awalnya merupakan daerah yang maju tapi tertekan, belakangan

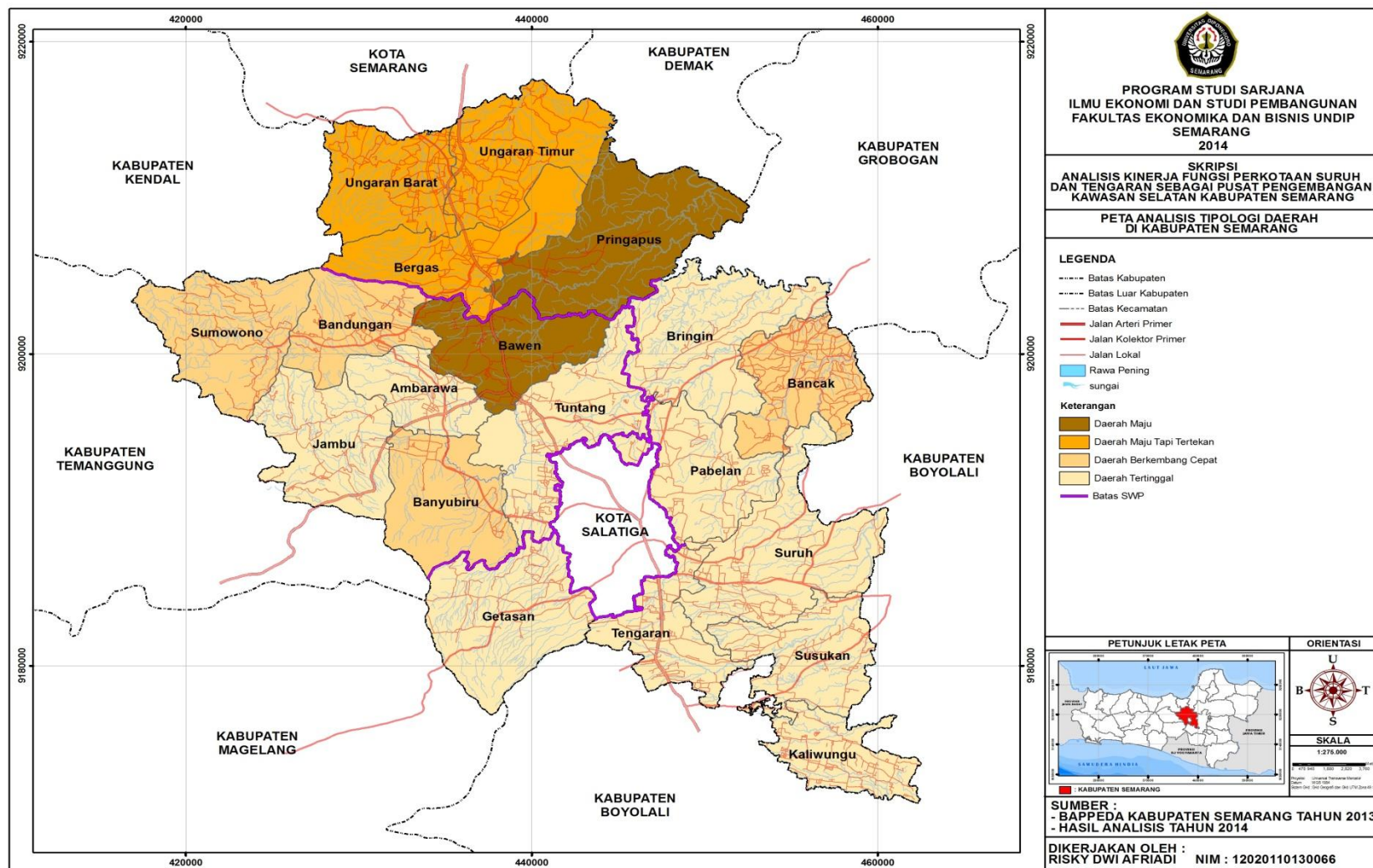
tumbuh menjadi daerah maju. Kecamatan Bergas pada tahun 2006 maupun 2011 tetap sebagai daerah maju tetapi tertekan. Kemudian, pada tahun 2011 kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat adalah Banyubiru, Sumowono, Bandungan, dan Bancak. Selanjutnya, Kecamatan Ambarawa, Jambu, Bringin, Pabelan, Tuntang, Kaliwungu, Suruh, Susukan, Tengaran, dan Getasan merupakan kecamatan tertinggal.

Hasil analisis tipologi daerah diatas menunjukkan adanya kesenjangan antarkawasan di Kabupaten Semarang. Kecamatan-kecamatan yang termasuk kategori daerah maju dan tumbuh cepat terletak di Kawasan Utara dan Tengah. Sedangkan hampir semua kecamatan yang masuk kategori tertinggal terletak di Kawasan Selatan. Daerah yang termasuk tertinggal ini merupakan kecamatan yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Semarang.

Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang 2011–2031, dalam Bab III disebutkan strategi penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Strategi penyediaan ruang wilayah tersebut diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Sistem pusat pelayanan tersebut berupa sistem perwilayahan dengan 3 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai berikut:

- a. SWP-1 atau Kawasan Utara yaitu kawasan yang ditetapkan menjadi bagian dari ibukota Kabupaten serta kawasan sekitarnya yang termasuk dalam jangkauan pelayanannya meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus dengan pusat pengembangan di perkotaan Ungaran. SWP-1 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, dengan fungsi pusat SWP adalah pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan;
- b. SWP-2 atau Kawasan Tengah yaitu kawasan yang menjadi wilayah pengaruh dari Kota Ambarawa meliputi Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bandungan, Jambu, Bawen dan Sumowono dengan pusat pengembangan di perkotaan Ambarawa. SWP-2 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman, perikanan, serta pertahanan dan keamanan dengan fungsi pusat SWP adalah perdagangan dan jasa agribisnis, serta fasilitas umum;
- c. SWP-3 yaitu kawasan yang berada di daerah Selatan meliputi Kecamatan Suruh, Tenganan, Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bancak dan Bringin dengan pusat pengembangan di perkotaan Suruh dan Tenganan. SWP-3 diarahkan mempunyai fungsi industri, pertanian, pariwisata, dan perikanan, dengan fungsi pusat SWP adalah pusat industri, agribisnis, perdagangan dan jasa, serta pusat fasilitas umum penunjang agropolitan.





Tampak pada Gambar 1.4, kecamatan-kecamatan yang termasuk daerah maju dan maju tapi tertekan seperti Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, dan Pringapus terlihat mengumpul di Kawasan Utara kabupaten, sedangkan daerah berkembang dan tertinggal menyebar di Kawasan Tengah dan Selatan. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah merupakan faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan antarwilayah (Sjafrizal, 2012). Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dilihat dari adanya aktivitas perkotaan, pasar, kawasan industri, kawasan wisata. Adanya konsentrasi kegiatan ekonomi ini akan menimbulkan adanya aktivitas lain yang menghidupkan aktivitas prekonomian seperti usaha rumah makan, persewaan tempat tinggal, pertokoan, dan sebagainya.

Gambar 1.5
Konsentrasi Kegiatan Ekonomi di Kawasan Utara



Sumber: Survei lapangan, 28-30 September. Gambar kiri: Pusat pemerintahan kabupaten terletak di kota Ungaran. Gambar kanan: Salah satu pabrik yang berlokasi di kawasan industri Ungaran-Bawen.

Berdasarkan hasil prasurvei lapangan, tampak bahwa kegiatan ekonomi di kabupaten Semarang terkonsentrasi di Kawasan Utara dan Tengah yaitu di sepanjang koridor Ungaran-Bawen, perkotaan Ambarawa, dan Bandungan. Hal ini dikarenakan Ungaran sebagai ibukota pusat pemerintahan kabupaten dan

daerah perkotaan terletak di Kawasan Utara. Selain itu, di kawasan tersebut banyak terdapat industri-industri besar seperti PT. Apac Inti Corpora, PT. Ungaran Sari Garmen, PT. Sinar Sosro, pabrik Coca-Cola dan lain sebagainya yang berperan besar dalam perekonomian kabupaten.

Kemudian untuk Kawasan Tengah, beberapa kecamatan termasuk daerah yang sedang tumbuh, sedangkan sebagian lagi masih masuk dalam tertinggal. Konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Tengah berada sekitar perkotaan Ambarawa dan kawasan wisata Bandungan. Di perkotaan Ambarawa terdapat pasar hewan, beberapa toko swalayan dan Pasar Projo yang merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Semarang. Adanya aktivitas perkotaan ini akan turut memacu perkembangan wilayah sekitar. Kemudian Kecamatan Bandungan terkenal sebagai kawasan wisata pegunungan unggulan di Kabupaten Semarang dan Jawa Tengah.

Gambar 1.6
Konsentrasi Kegiatan Ekonomi di Kawasan Tengah



Keterangan:

Gambar kiri: Keramaian di Kawasan Wisata Bandungan. Gambar kanan: Pasar Projo yang menjadi pusat perdagangan bagi warga Ambarawa dan sekitarnya.

Jika dicermati lebih spesifik, di Kawasan Selatan yang terdiri dari Kecamatan Tenganan dan sekitarnya semuanya masuk dalam kategori tertinggal kecuali Kecamatan Bancak. Kecamatan Tenganan dan Pabelan yang pada tahun 2006 termasuk daerah berkembang cepat, pada tahun 2011 menjadi daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan kesenjangan wilayah yang semakin tinggi antara Kawasan Selatan dengan kawasan lain di Kabupaten Semarang. Di kawasan ini, kegiatan ekonomi berpusat di daerah perkotaan Tenganan utamanya di sekitar Pasar Kembang Sari. Namun, aktivitas perkotaan di Kawasan Selatan masih kurang hidup jika dibandingkan dengan Kawasan Utara maupun Tengah. Kondisi tersebut terlihat dari kompleks pertokoan yang sepi.

Gambar 1.7
Konsentrasi Kegiatan Ekonomi di Kawasan Selatan



Sumber: Survei lapangan, 28-30 April 2014. Gambar kiri: Kompleks pertokoan di kecamatan Tenganan nampak sepi. Gambar kanan: Kawasan industri yang mulai dikembangkan di Kawasan Selatan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa masih ada kesenjangan antarkawasan di Kabupaten Semarang. Konsentrasi kegiatan ekonomi selama ini lebih berpusat di Kawasan Utara dan Tengah karena didukung sarana prasarana dan fasilitas lebih memadai dibandingkan dengan Kawasan

Selatan. Oleh karena itu, Kawasan Selatan dipilih sebagai lokasi studi karena mengalami ketertinggalan dengan kawasan lain sehingga perlu dikembangkan.

Kawasan Selatan Kabupaten Semarang jika dibiarkan tertinggal akan mengakibatkan kesenjangan pembangunan daerah. Menurut Arsyad dalam Sitorus (2012), ketimpangan daerah yang dibiarkan secara terus akan membawa pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan.

Kawasan Selatan memiliki sumberdaya alam dan lahan cukup besar untuk dikembangkan. Sesuai dengan fokus pembangunan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor andalan “INTANPARI”, dalam RTRW Kabupaten Semarang, Kawasan Selatan dirancang sebagai kawasan industri dan agropolitan dengan pusat pengembangan berada di perkotaan Suruh dan Tenganan. Adanya pusat pengembangan di Suruh dan Tenganan bertujuan mengurangi ketergantungan kawasan selatan dengan daerah lain. Namun, selama ini interaksi keruangan masyarakatnya lebih condong dengan daerah lain, seperti Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali karena aksesibilitas lebih mudah dan fasilitas pelayanan yang lebih lengkap (hasil wawancara dengan staf kecamatan dan beberapa masyarakat setempat, pada 17-18 Juni, 2014).

Perkotaan Suruh dan Tenganan dengan segenap kelengkapannya harus dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat pengembangan untuk mendorong perkembangan Kawasan Selatan. Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Semarang, fungsi pusat pelayanan kegiatan perkotaan Suruh dan

Tengaran sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan ditingkatkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp).

Berdasarkan uraian diatas, makaperlu dan menarik dilakukan studi mengenai sejauh mana berjalannya fungsi perkotaan Suruh dan Tengaran sebagai pusatpengembangan wilayah sekitarnya mengingat dalam perda RTRW skala pelayanannya akan ditingkatkan.Kajian tentang sejauh mana kinerja pusat pengembangan perlu untuk dilakukan guna mengukur ketercapaian kebijakan pengembangan wilayah.Definisi kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai dan kemampuan kerja/prestasi dari seseorang ataupun suatu hal. Dalam penelitian ini, kinerja fungsi kota diukur dengan ketersediaan fasilitas pelayanan publik seperti di bidang kesehatan, perekonomian, peribadatan, transportasi, rekreasi, dan pendidikan.Selanjutnya, kinerja fungsi kota juga diukur melalui interaksi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut.

Pengertian Pusat Pengembangan Kawasan dalam Perda RTRW Kabupaten Semarangadalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dalam studi ini, akan dilihat sejauh manakerja kawasan perkotaan Suruh dan Tengaran dalam melayani beberapa kecamatan yang merupakanwilayah belakangnya dalam SWP-3 atau Kawasan Selatan Kabupaten Semarang yaitu kecamatan Bancak, Bringin, Pabelan, Susukan, Getasan, dan Kaliwungu. Sejalan dengan maksud tersebut, maka judul penelitianini adalah: **“ANALISIS KINERJA FUNGSI PERKOTAAN SURUH DAN TENGARAN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN SELATAN KABUPATEN SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Kawasan Selatan diarahkan dalam Perda No.6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Semarang menjadi kawasan berbasis pertanian dan industri. Hal ini sesuai dengan tiga pilar utama sektor unggulan Kabupaten Semarang yaitu industri, pertanian, dan pariwisata. Salah satu strategi dalam pembangunan kawasan selatan yaitu melalui penetapan perkotaan Suruh dan Tenganan sebagai pusat agar dapat mendorong wilayah belakangnya. Namun, ketimpangan wilayah masih terjadi di Kawasan Selatan sehingga kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut masih tertinggal dibanding wilayah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan di Kabupaten Semarang belum berjalan secara merata. Adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pengembangan wilayah dengan fakta yang terjadi di lapangan menjadikan hal ini perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi ketersediaan fasilitas pelayanan publik di Kawasan Selatan?
2. Bagaimana kondisi prasarana fisik perkotaan Suruh dan Tenganan?
3. Bagaimana interaksi keruangan masyarakat di Kawasan Selatan?
4. Bagaimana kinerja fungsi perkotaan Suruh dan Tenganan sebagai pusat pengembangan Kawasan Selatan Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan publik di Kawasan Selatan.
2. Mengidentifikasi kondisi prasarana fisik perkotaan Suruh dan Tenganan.
3. Mengetahui interaksi keruangan masyarakat di Kawasan Selatan.
4. Menganalisis kinerja fungsi perkotaan Suruh dan Tenganan sebagai pusat pengembangan Kawasan Selatan Kabupaten Semarang.

Setelah tujuan tersebut di atas tercapai, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pembaca maupun pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai kinerja sebuah pusat pengembangan kawasan kepada pihak terkait dan berkepentingan sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.
2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai fungsi sebuah pusat pengembangan kawasan dalam mendukung pengembangan wilayah sekitarnya.
3. Menjadi sumbangan pemikiran dan menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya mengenai pengembangan wilayah supaya hasilnya lebih baik dan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II menyajikan tinjauan pustaka yang berisi penjelasan mengenai dasar-dasar teori yang melandasi penelitian ini, berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan kerangka pemikiran.
3. Bab III menerangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup jenis dan definisi operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.
4. Bab IV mencakup gambaran umum objek penelitian, yaitu kondisi perkotaan Suruh dan Tenganan beserta Kawasan Selatan Kabupaten Semarang yang diuraikan dalam hasil analisis data.
5. Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Wilayah sebagai Suatu Konsep

Dalam ilmu regional, wilayah (*region*) didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang di batasi oleh kriteria tertentu dan bagian-bagiannya tergantung secara internal. Sedangkan menurut Perda No.6 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kabupaten Semarang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional. Selanjutnya menurut Rahardjo (2005:89) konsep wilayah atau *region* mempunyai tiga macam pengertian, yaitu wilayah homogen, wilayah polarisasi atau wilayah nodal, dan wilayah perencanaan atau wilayah program. Adapun ketiga konsep wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wilayah homogen merupakan suatu konsep yang menganggap bahwa wilayah-wilayah geografis dapat dikaitkan bersama-sama menjadi sebuah wilayah tunggal apabila wilayah-wilayah tersebut mempunyai karakteristik yang serupa. Karakteristik tersebut dapat bersifat ekonomi, geografis, bahkan dapat pula bersifat sosial politis.
2. Wilayah nodal (pusat) atau wilayah-wilayah polarisasi (berkutub) terdiri dari satuan-satuan wilayah yang heterogen. Misalnya distribusi penduduk yang terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu akan mengakibatkan lahirnya kota-kota besar.

3. Wilayah perencanaan atau wilayah program sangat penting bila dikaitkan masalah-masalah kebijakan wilayah. Wilayah difungsikan sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pembagian wilayah perencanaan disusun berdasarkan analisis kegiatan pembangunan sektoral yang terlokalisasi pada satuan lingkungan geografis. Wilayah perencanaan merupakan suatu wilayah pengembangan, dimana program-program pembangunan dilaksanakan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persoalan koordinasi dan desentralisasi pembangunan wilayah dapat dikembangkan. Wilayah perencanaan hampir sama dengan wilayah polarisasi, karena efisiensi maksimum dalam perencanaan dipengaruhi oleh saling keterhubungan arus regional secara maksimum.

2.1.2 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, menjaga kelestarian lingkungan hidup pada satu wilayah (Dodi, 2002). Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan. Sugeng (1999) mengungkapkan, pada sisi sosial ekonomis pengembangan wilayah adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, sarana dan prasarana pelayanan, dan sebagainya. Di sisi lain, secara ekologis pengembangan wilayah bertujuan menjaga keseimbangan lingkungan akibat campur tangan manusia terhadap lingkungan. Sehingga, pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi

sosial ekonomi, budaya, geografis yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pengembangan Wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan permasalahan masing-masing wilayah.

Menurut Dodi (2002), konsep pengembangan wilayah berbeda dengan pembangunan sektoral. Pengembangan wilayah sangat berorientasi pada permasalahan pokok wilayah secara saling terkait, sedangkan pembangunan sektoral bertujuan mengembangkan sektor tertentu, tanpa memperhatikan kaitan dengan dengan sektor-sektor lainnya. Kedua konsep tersebut harus saling melengkapi, dalam arti bahwa pengembangan wilayah tidak mungkin terwujud tanpa adanya pembangunan sektoral. Sebaliknya, pembangunan sektoral tanpa berorientasi pada pengembangan wilayah akan berujung pada tidak optimalnya pembangunan sektor itu sendiri. Sehingga, pengembangan wilayah seharusnya menjadi acuan bagi pembangunan sektoral, bukan merupakan agregat dari pembangunan sektor-sektor pada suatu wilayah.

Pengembangan wilayah diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi perkembangan antar wilayah, guna menjembatani kesenjangan antar desa-kota, pusat pertumbuhan dan *hinterlandnya*, serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya wilayah (Rusmansyah, 2006).

2.1.3 Strategi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dapat dianggap sebagai bentuk intervensi positif terhadap pembangunan di suatu wilayah. Untuk itu, diperlukan strategi-strategi yang efektif untuk suatu percepatan pembangunan. Selain strategi-strategi untuk

wilayah yang telah berkembang, juga dibutuhkan strategi pengembangan di wilayah-wilayah baru(Ernan Rustiadi, dkk 2011).

M.T Zen (1980, dalam Sugeng, 1999) mengungkapkan bahwa perkembangan Indonesia dalam dua-tiga dasawarsa mendatang akan tergantung pada kemampuannya mengerahkan tiga unsur pokok, yaitu: (1) ketersediaan SDA, (2) kemampuan SDM, dan (3) pemanfaatan teknologi, yang kesemuanya harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Hubungan ketiga unsur tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1



2.1.4 Pengertian Kota

Kota adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, yang sebagian lahannya terbangun, dan perekonomiannya bersifat non pertanian. Dilihat dari aspek sosial ekonomi, kota mempunyai ciri-ciri: (a) jumlah penduduk yang relatif besar daripada wilayah sekitarnya, (b) mempunyai kepadatan penduduk yang relatif tinggi dibanding wilayah sekitarnya, (c) mempunyai proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian lebih tinggi daripada wilayah

sekitarnya, (d) merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan kegiatan pertanian wilayah sekitarnya dan tempat pemrosesan serta pemasaran bahan baku bagi industri (Inmendagri No. 34 tahun 1986).

Berdasarkan jumlah penduduknya, kota dibedakan menjadi: (1) kota kecil, dengan jumlah penduduk 20.000-50.000 jiwa; (2) kota sedang, dengan jumlah penduduk 50.000-100.000 jiwa; (3) kota besar, dengan jumlah penduduk 1.000.000-10.000.000 jiwa (Daljoeni, 1998). Pada penelitian ini sesuai dengan ciri-ciri tersebut di atas, perkotaan Suruh dan Tenganan termasuk ke dalam kota kecil/kotakecamatan.

2.1.5 Fungsi Kota

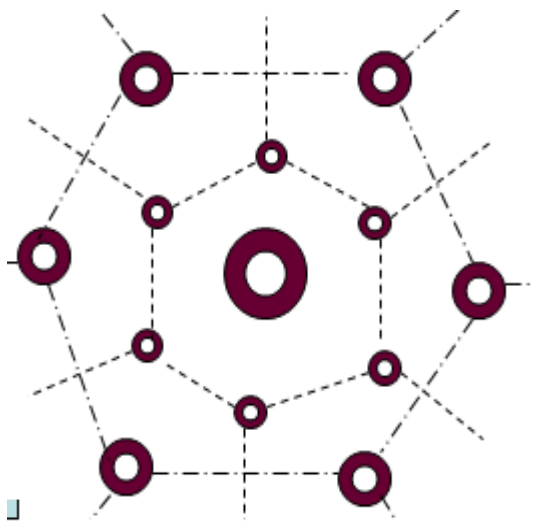
Fungsi kota adalah penentuan kegiatan kota yang ditetapkan berdasarkan hirarki perkotaan dengan indikator berupa kelengkapan fasilitas pelayanan kota (Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003).

Menurut Bratakusumah (dikutip dari Dita, 2007), fungsi kota adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (*customer*). Fungsi kota adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana serta pergantian moda transportasi. Dalam pengembangan wilayah, fungsi kota terbagi menjadi:

1. Kota sebagai bagian dari sistem perwilayahan.

- Kota membentuk sistem perkotaan di dalam wilayah, dengan menempatkan fungsi kota sesuai dengan potensi/kapasitas pengembangannya, misalnya dengan membentuk hirarki kota.

Gambar 2.2
Diagram Sistem Perkotaan



Sumber: Tarigan, 2007

Keterangan gambar: Lingkaran besar di tengah (1 buah) merupakan kota pertama, yang berhirarki paling tinggi. Kemudian lingkaran sedang di luar (6 buah) adalah kota berhirarki dibawah kota pertama. Lingkaran kecil diantara lingkaran paling besar dan sedang merupakan kota yang mendapat pengaruh dari kota pertama dan kedua.

- Kota membentuk jaringan pelayanan sosial ekonomi di dalam wilayah, dengan menempatkan fungsi kota sebagai pusat pengembangan dan pelayanan penduduk.
2. Kota berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah.
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN), karena memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengembangan nasional. Contoh: Jakarta, Surabaya, Manado, Medan.

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengembangan skala wilayah propinsi dan atau kabupaten seperti ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dll. Contoh: Ungaran.
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL), karena memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengembangan skala lokal seperti ibukota kecamatan, dll. Contoh: Ambarawa, Suruh, dan Tenganan.

3. Jenis fungsi pelayanan kota.

- Pelayanan Pengumpul Hasil Pertanian: Sebagai pengumpul hasil produk pertanian dari wilayah pengembangannya.
- Kawasan Konsumen: Sebagai lokasi konsumen bagi hasil produk pertanian dan industri.
- Pelayanan Sosial: Sebagai penyedia pelayanan sosial, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dll.
- Pelayanan Ekonomi: Sebagai penyedia pelayanan ekonomi, seperti pertokoan, penyedia konsumen, dll.
- Penyedia Lapangan Pekerjaan: Sebagai penyedia berbagai lapangan pekerjaan yang heterogen.

Menurut Richardson (2001), dalam teori tempat pusat dinyatakan bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan, penyuplai barang-barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan dan profesional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan dan jasa-jasa pemerintahan. Selanjutnya menurut Jayadinata (1999), dalam kegiatan sosial ekonomi terdapat suatu istilah, yaitu ambang (*threshold*), yang berarti jumlah minimal penduduk

yang diperlukan untuk menunjang supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar. Misalnya suatu macam prasarana yang lebih tinggi fungsinya, atau yang diperlukan oleh jumlah penduduk yang besar jumlahnya (pasar, sekolah, dan sebagainya), harus terletak di wilayah yang jangkauan pelayanannya yang lebih luas, yaitu bukan desa, tapi kecamatan.

Hirarki suatu kota menurut Rondinelli (1983) akan mempengaruhi fungsi suatu kota. Kota-kota menengah dan kecil mempunyai fungsi yang dapat digolongkan menjadi 8 bagian, yaitu: (1) Pusat pelayanan umum dan sosial, (2) Pusat komersial dan pelayanan jasa, (3) Pusat pemasaran dan perdagangan regional, (4) Pusat penyediaan dan pemrosesan produk pertanian, (5) Pusat industri kecil, (6) Pusat transportasi dan komunikasi regional, (7) Pusat penarik migrasi dari pedesaan dan sumber pendapatan bagi daerah pedesaan, (8) Pusat transformasi sosial.

Menurut Tarigan (2007), hirarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya kota (jumlah penduduk), sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh.

2.1.6 Analisis Wilayah Pengaruh

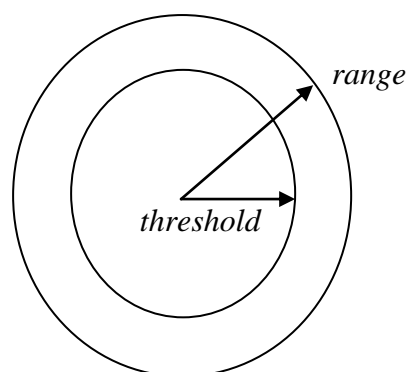
Menurut Tarigan (2007), wilayah belakang (*hinterland*) dikatakan sebagai wilayah pengaruh sebuah kota apabila dalam memenuhi kebutuhannya atau

menjual hasil produksinya cenderung bergantung kepada kota tersebut, termasuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, atau rekreasi.

Interaksi kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh jarak pasar maksimum yang ingin ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas. Hal ini dinyatakan Richardson (2001) bahwa hubungan antara kota dengan wilayahnya terjadi akibat kota membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.

Kemudian Peter E. Lloyd (dikutip dari Tarigan, 2007) dalam bukunya “Location in Space” mengatakan bahwa jangkauan/luas pasar dari setiap komoditi itu ada batasnya yang dinamakan *range* dan ada batas minimal dari luas pasarnya agar produsen bias tetap memproduksi. Luas pasar itu dinamakan *threshold*.

Gambar 2.3
Luas Jangkauan *Range* dan *Threshold*



Sumber: Tarigan, 2007

Analisis wilayah pengaruh ini dilakukan untuk mendapatkan sejauh mana wilayah pengaruh dari suatu daerah. Pengaruh dalam hal ini berupa pengaruh secara keruangan, yaitu pengaruh dari pusat-pusat pelayanan sebagai pusat retail.

Pusat retail sendiri selain merupakan kota yang berperan sebagai pusat pelayanan dengan orde paling tinggi, juga merupakan kota dengan basis atau sektor dominan pada sektor perdagangan.

2.1.7 Fasilitas yang Dibutuhkan Dalam Suatu Kota Kecamatan

Fasilitas kota selain mampu membentuk struktur fisik kota, juga dibutuhkan sebagai wadah aktivitas baik ekonomi maupun sosial sehari-hari bagi masyarakat setempat (Morris, dalam Dita, 2007). Menurut Rondinelli dan Kenneth (1978), fasilitas pelayanan seharusnya berlokasi di pusat pasar sebuah kota kecil, diantaranya terdiri dari: pasar permanen, kantor pemerintahan, bank, klinik dan rumah sakit kecil, sekolah menengah, jalan arteri, listrik, pipa air, persampahan, transportasi, terminal, lumbung/gudang, fasilitas pemrosesan makanan, telepon, kantor polisi, kantor pos, pemadam kebakaran, dan pelayanan keamanan.

Sedangkan menurut *United Nations* (1979), fasilitas yang harus tersedia diantaranya adalah fasilitas: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olah raga, keagamaan, rekreasi, kebudayaan, administrasi, keamanan, komersial, keuangan, pertanian, peternakan, industri, transportasi, pos dan telekomunikasi, perumahan persampahan, drainase, listrik, serta jalan. Fasilitas harus merinci ruang lingkup pelayanan, jumlah dan kualitas fasilitas untuk masing-masing kelompok umur, kebutuhan ruang, dan lain sebagainya. Pendekatannya dilakukan atas satuan penduduk yang dapat mendukung adanya fasilitas tersebut.

2.1.8 Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya dengan lokasi berbagai macam kegiatan atau usaha lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi berbagai kegiatan seperti rumah tangga, pertokoan, pabrik, pertanian, sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit tidaklah asal saja berada di lokasi tersebut, melainkan menunjukkan pola dan susunan yang dapat diselidiki dan dapat dimengerti (Tarigan, 2007).

Salah satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang berpergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat bagaimana suatu lokasi yang memiliki potensi atau daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya di mana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki potensi tersebut. Hal tersebut terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut.

Menurut pernyataan Losch dalam Tarigan (2007), lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual tersebut semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Atas dasar pandangan di atas Losch menyarankan agar lokasi produksi

berada di pasar atau di dekat pasar. Hal ini dikenal dengan Teori Lokasi *Market Area*.

2.1.9 Teori Tempat Pusat

Teori ini dikembangkan oleh Christaller dan August Losch yang membahas susunan *urban centre* dan didasari keinginan meminimalkan biaya dan juga memperhatikan penyebaran permukiman, desa, dan kota yang ukurannya berbeda. Perbedaan ini membentuk suatu pusat pelayanan bagi wilayah disekitarnya yang disebut daerah komplementer dan membentuk suatu hirarki (Daljoeni, 1997).

Menurut teori Christaller tahapan pembentukan daerah pemasaran dimulai dari terbentuknya daerah penawaran dan pemasaran karena adanya jarak ekonomi dan berupa lingkaran dengan radius tertentu. Selanjutnya timbul lingkungan pemasaran lain dan persaingan secara spasial.

2.1.10 Pusat Pertumbuhan

Francois Perroux (dikutip dari Rahardjo, 2005) berpendapat mengenai pusat pertumbuhan sebagai berikut:

“Growth does not appear everywhere and all at once; it appear in points or development poles, with variabel intensities; it spreads along diverse channels and with varying terminal effect for the whole of the economic. In terms of geographic space dominant and propulsive industries make the agglomeration where they are located the poles of their regions”

Menurut Tarigan (2007), pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang

industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi ke dalam maupun ke luar (wilayah belakangnya). Sedangkan secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, meskipun mungkin tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut terdapat 4 ciri-ciri utama pusat pertumbuhan yaitu:

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi.

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

2. Ada efek pengganda.

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Unsur efek pengganda sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan daerah belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari daerah belakangnya akan meningkat juga.

3. Adanya konsentrasi geografis.

Konsentrasi berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Sehingga dapat meningkatkan *economic of scale*.

4. Bersifat mendorong wilayah belakangnya.

Hal ini berarti kota dan daerah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Menurut Budiharsono (2001) Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pusat- pusat pertumbuhan adalah :

- a. Letak suatu wilayah yang strategis menyebabkan suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan.
- b. Ketersediaan sumber daya alam pada suatu wilayah akan menyebabkan wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan.
- c. Kekuatan aglomerasi terjadi karena ada sesuatu yang mendorong kegiatan ekonomi sejenis untuk mengelompok pada suatu lokasi karena adanya suatu keuntungan yang kemudian akan menyebabkan timbulnya pusat pertumbuhan.
- d. Faktor investasi pemerintah merupakan sesuatu yang disengaja dibuat (*artificial*).

Pada dasarnya pusat wilayah mempunyai hirarki. Hirarki dari suatu pusat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Jumlah penduduk yang bermukim pada pusat tersebut
2. Jumlah fasilitas pelayanan umum yang tersedia, dan
3. Jumlah jenis fasilitas pelayanan umum yang tersedia.

Dalam pengembangan wilayah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Pada skala regional dikenal tiga orde, yaitu (Friedmann dalam Sapoetro, 2004) :

1) Pusat pertumbuhan primer (utama)

Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih rendah tingkatannya. Biasanya pusat pertumbuhan orde satu ini dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya.

2) Pusat pertumbuhan sekunder (kedua)

Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat dari sub daerah, seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini.

3) Pusat pertumbuhan tersier (ketiga)

Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhi.

Dalam penerapannya, teori kutub pertumbuhan digunakan sebagai alat kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah. Banyak negara telah menerima konsep pertumbuhan sebagai suatu alat transformasi ekonomi dan sosial pada skala regional (Sapoetro, 2004).

2.1.11 Interaksi Keruangan

Menurut para geografer, interaksi dapat dijelaskan dalam tiga bentuk utama (Sapoetro, 2004), yaitu :

- 1) Migrasi, jika menyangkut arus manusia.
- 2) Komunikasi, jika menyangkut perpindahan gagasan dan informasi
- 3) Transportasi, jika menyangkut materi dan energi

Kemudian menurut Daldjoeni (1997), interaksi keruangan dapat terjadi jika terpenuhi oleh tiga persyaratan, yaitu:

- 1) Komplementaritas, merupakan perbedaan karakteristik antarwilayah yang saling melengkapi dan selanjutnya melahirkan permintaan.
- 2) Transferabilitas, yaitu semakin kecilnya hambatan dalam hal waktu dan biaya sehingga interaksi relatif lebih mudah
- 3) *Intervening opportunities* (absennya alternatif lain) adalah tidak adanya pilihan alternatif lain dalam hal pemenuhan kebutuhan, sehingga perlu berinteraksi dengan wilayah lain.

Menurut Hayness dan Fotheringham (1984) dikutip dari Gultom (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “*Gravity and Spatial Interaction Models*” mengungkapkan definisi interaksi spasial sebagai berikut:

“Spatial interaction is a broad term encompassing any movement over space that results from a human process . It includes journey-to-work, migration, information and commodity flows, student enrollments and conference attendance, the utilization of public and private facilities, and even the transmission of knowledge “

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan interaksi spasial merupakan sesuatu yang mencakup tentang semua pergerakan atau mobilitas pada suatu ruang atau wilayah yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, aliran barang dan jasa serta informasi, pergerakan mahasiswa dengan alasan pendidikan, juga penggunaan fasilitas publik dan persebaran ilmu pengetahuan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Erwin Harahap (2009) melakukan penelitian dengan judul *Kecamatan Perbaungan Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Serdang Bedagai*. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pemerataan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan menetapkan Kecamatan Perbaungan sebagai pusat pertumbuhannya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode tren untuk memproyeksikan jumlah penduduk dan penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan. Teknik analisis yang kedua menggunakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan pola penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan dan kesehatan berdasarkan atas standar pedoman perencanaan lingkungan pemukiman kota dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Cipta Karya Tahun 1979. Hasil analisis

menunjukkan: (1) Proyeksi penduduk di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan tahun 2014 berjumlah 136.184 jiwa, (2) dengan jumlah penduduk sebesar itu maka dibutuhkan penambahan fasilitas bangunan sekolah TK sebanyak 66 unit, gedung SD 65 unit, gedung SLTP 25 unit, sedangkan prasarana kesehatan perlu penambahan gedung puskesmas sebanyak 1 unit, puskesmas pembantu 14 unit, balai pengobatan umum 4 unit dan praktek dokter 12 unit, (3) hasil analisis menunjukkan bahwa proyeksi penyerapan tenaga kerja di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan 2014 berjumlah 16.681 jiwa.

Selanjutnya penelitian yang berjudul *Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan* ditulis oleh Sasya Danastri pada tahun 2011. Tujuan penelitian ini tersebut adalah: (i) untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini Kecamatan Harjamukti dilihat dari aspek ekonomi, aspek kependudukan dan aspek fasilitas pelayanan publik, (ii) untuk mengetahui interaksi antar kelurahan di kecamatan Harjamukti, (iii) untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan di kecamatan Harjamukti dilihat dari aspek ekonomi, aspek kependudukan, dan aspek fasilitas pelayanan publik, (iv) dan untuk mengetahui wilayah pembangunan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan di kecamatan Harjamukti. Alat analisisnya adalah Analisis Basis Ekonomi dengan Metode Langsung, Analisis Gravitasi, Analisis Skalogram, dan Metode Overlay. Hasil Analisisnya menunjukkan Kelurahan Kecapi berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, dan kesehatan karena

kelengkapan fasilitasnya, sedangkan Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan pemerintah karena merupakan ibukota kecamatan, dan pusat pemukiman, dan daerah wisata rohani. Kelurahan Harjamukti berpotensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan lahan kosongnya berpotensi sebagai lahan peternakan. Kelurahan Larangan berpotensi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perdagangan jasa, karena jaraknya yang sangat dekat dengan Kelurahan Kecapi. Kelurahan Argasunya berpotensi sebagai pusat pemukiman, lahannya berpotensi untuk perkebunan dan peternakan.

Dita Hestudiputri (2007) dengan penelitiannya yang berjudul *Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang* menunjukkan (1) analisis wilayah pengaruh dan analisis interaksi pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya menunjukkan bahwa peran IKK (ibu Kota Kecamatan) Lasem sebagai pusat pertumbuhan telah mampu menjadi penarik bagi pusat pertumbuhan di Kecamatan Rembang, (2) dengan adanya kegiatan perkotaan di IKK Lasem yang didukung oleh aksesibilitas yang tinggi antara IKK Lasem dan daerah belakangnya membawa pengaruh dan membuat peran IKK Lasem sebagai pusat pertumbuhan terpenuhi, (3) berdasarkan hasil analisis IKK Lasem telah mempunyai pelayanan fasilitas yang lengkap dengan jangkauan fungsi dan pelayanan yang luas dari mulai kecamatan hingga kabupaten (terutama fasilitas transportasi) sehingga fungsi IKK Lasem sebagai pusat pertumbuhan telah terpenuhi, (4) IKK Lasem memiliki potensi untuk dikembangkan lebih, melihat posisinya yang strategis. Sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

Kemudian penelitian yang berjudul *Analisis Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banjarnegara* ditulis oleh Refika Ardila pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kecamatan-kecamatan pusat pertumbuhan, interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan hinterlandnya, kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Analisis yang digunakan adalah analisis skalogram dan indeks sentralitas, metode gravitasi, analisis tipologi klassen dan analisis *Location Quotient*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh enam kecamatan yang termasuk kecamatan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja Klampok dan Susukan. Terdapat interaksi dan angka interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan hinterlandnya berbeda-beda. Sebagian besar kecamatan masih berada pada daerah relatif tertinggal. Rata-rata sektor basis menyebar secara merata di 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, namun sektor basis yang paling dominan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat enam kecamatan pusat pertumbuhan yang saling berinteraksi dengan kecamatan di sekitarnya. Kondisi perekonomian dan sektor basis di tiap kecamatan berbeda-beda.

Terakhir adalah penelitian yang berjudul *KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN* oleh Haryono Wahyudi (2004). Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi peran Kota Gombang dengan melihat tipologi ekonomi dan interaksi dengan wilayah sekitarnya,

mengidentifikasi wilayah pengaruh Kota Gombong, mengidentifikasi sistem kotadi Kabupaten kebumen dengan mengukur system hirarki kota, mengidentifikasi kedudukan Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan dalam perwilayahan di Kabupaten Kebumen. Metode analisisnya adalah metode LQ, model gravitasi, model Titik Henti, Skalogram Guttman, dan indeks sentralitas terbobot. Hasil dari penelitian ini adalah peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen adalah besar karena interaksi ekonomi yang besar terhadap wilayah Kebumen bagian barat yaitu 8 kecamatan: Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah, dan Puring. Selanjutnya fungsi Kota Gombong terhadap wilayah pengaruhnya diantaranya adalah pusat pelayanan umum dan sosial, pusat komersial dan jasa, pusat pemasaran dan regional, penyediaan dan pemrosesan produk pertanian, pusat transportasi dan komunikasi regional, pusat transformasi sosial. Kemudian sistem Kota Gombong terdiri dari: Kota Gombong, Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah, dan Puring.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Tujuan Penelitian	Variabel dan Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	<p><i>KECAMATAN PERBAUNGAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI</i></p> <p>Disusun oleh: Erwin Harahap, 2009</p>	<p>1. Menggambarkan keadaan sekarang pada wilayah pusat pertumbuhan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.</p> <p>2. Menganalisis kebutuhan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan industri (dilihat dari penyerapan tenaga kerjanya) pada wilayah pusat pertumbuhan di Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sampai</p>	<p>Variabel: Sarana dan prasarana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, jumlah kepadatan penduduk, dan jumlah penyerapan tenaga kerja</p> <p>Metode Analisis : 1. Metode Tren. 2. Analisis kebutuhan pengembangan dan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas.</p>	<p>1. Keadaan saat ini di Kecamatan Perbaungan pada tahun 2007 terdapat 99.777 jiwa, dan setelah melakukan penelitian dan diproyeksi ke depan jumlah penduduk akan mengalami kenaikan sebesar 136.184 jiwa ditahun 2014.</p> <p>2. Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2014, diperlukan penambahan sarana TK sebanyak 66 unit, gedung SD 65 unit, gedung SLTP 25 unit, puskesmas 1 unit, puskesmas pembantu 14 unit, balai pengobatan umum 4 unit, dan praktek dokter 12 unit.</p> <p>3. Dari hasil proyeksi, tahun 2014 penyerapan tenaga kerja akan bertambah menjadi 16.681</p>

		tahun 2014.		jiwa.
2.	<p><i>ANALISIS PENETAPAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN BARU DI KECAMATAN HARJAMUKTI, CIREBON SELATAN</i></p> <p>Disusunoleh: Sasya Danastri, 2011</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggambarkan keadaan sekarang pada wilayah pusat pertumbuhan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. 2. Mengetahui kekuatan interaksi antar daerah di Kecamatan Harjamukti. 3. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan pusat pertumbuhan di Kecamatan Harjamukti. 4. Mengetahui wilayah pembangunan mana saja yang dapat ditetapkan sebagai kutub pertumbuhan untuk mendorong pembangunan di 	<p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan Interaksi 2. Ketersediaan Fasilitas 3. Potensi Ekonomi <p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Basis Ekonomi dengan metode langsung 2. Analisis Gravitasi 3. Analisis Skalogram 4. Metode Overlay 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Kecapi berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, dan kesehatan karena kelengkapan fasilitasnya, 2. Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan pemerintah karena merupakan ibukota kecamatan, dan pusat pemukiman, dan daerah wisata rohani. 3. Kelurahan Harjamukti berpotensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan lahan kosongnya berpotensi sebagai lahan peternakan 4. Kelurahan Larangan berpotensi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perdagangan jasa, karena jaraknya yang sangat dekat dengan Kelurahan Kecapi. 5. Kelurahan Argasunya berpotensi sebagai pusat pemukiman, lahannya berpotensi untuk perkebunan dan peternakan.

		Harjamukti.		
3.	<p><i>PERAN DAN FUNGSI IBU KOTA KECAMATAN LASEM SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DI KABUPATEN REMBANG.</i></p> <p>Disusun oleh: Dita Hestuadiputri, 2007</p>	<p>Mengkaji peran dan fungsi Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lasem sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Rembang.</p>	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas penduduk 2. Jarak fasilitas 3. Pergerakan penduduk 4. Fasilitas pelayanan 5. Ketersediaan fasilitas <p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode deskriptif kuantitatif 2. Metode analisis struktur dan hierarki kota 3. Metode analisis wilayah pengaruh 4. Metode sosiogram 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis wilayah pengaruh dan analisis interaksi pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya menunjukkan bahwa peran IKK (ibu Kota Kecamatan) Lasem sebagai pusat pertumbuhan telah mamapu menjadi penarik bagi pusat pertumbuhan di Kecamatan Rembang. 2. Dengan adanya kegiatan perkotaan di IKK Lasem yang didukung oleh aksesibilitas yang tinggi antara IKK Lasem dan daerah belakangnya membawa pengaruh dan membuat peran IKK Lasem sebagai pusat pertumbuhan terpenuhi 3. Berdasarkan hasil analisis IKK Lasem telah mempunyai pelayanan fasilitas yang lengkap dengan jangkauan fungsi dan pelayanan yang luas dari mulai kecamatan hingga kabupaten.

4.	<p><i>PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN BANJARNEGARA</i></p> <p>Disusun oleh: Refika Ardila, 2012</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan 2. Mengetahui interaksi antara kecamatan pusat pertumbuhan dengan kecamatan <i>hinterlandnya</i> 3. Mengetahui kondisi perekonomian kecamatan dan sektor ekonomi potensial di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. 	<p>Variabel :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB 2. Pusat Pertumbuhan 3. PDRB per Kapita 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi <p>Metode :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Skalogram 2. Indeks Sentralitas 3. Metode Gravitasi 4. Analisis Tipologi Klassen 5. Analisis LQ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperoleh enam kecamatan yang termasuk kecamatan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Banjarnegara, Madukarta, Purwanegara, Mandiraja, Purwareja, Klampok dan Susukan. 2. Terdapat interaksi dan angka interaksi antara kecamatan pusat dengan kecamatan <i>hinterlandnya</i> berbeda-beda 3. Sebagian besar kecamatan masih berada pada daerah relative tertinggal 4. Rata-rata sektor basis menyebar secara merata di 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, namun sektor basis yang paling dominan adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. 5. Terdapat 6 kecamatan pusat yang saling berinteraksi dengan kecamatandisekitarnya.
----	---	--	--	--

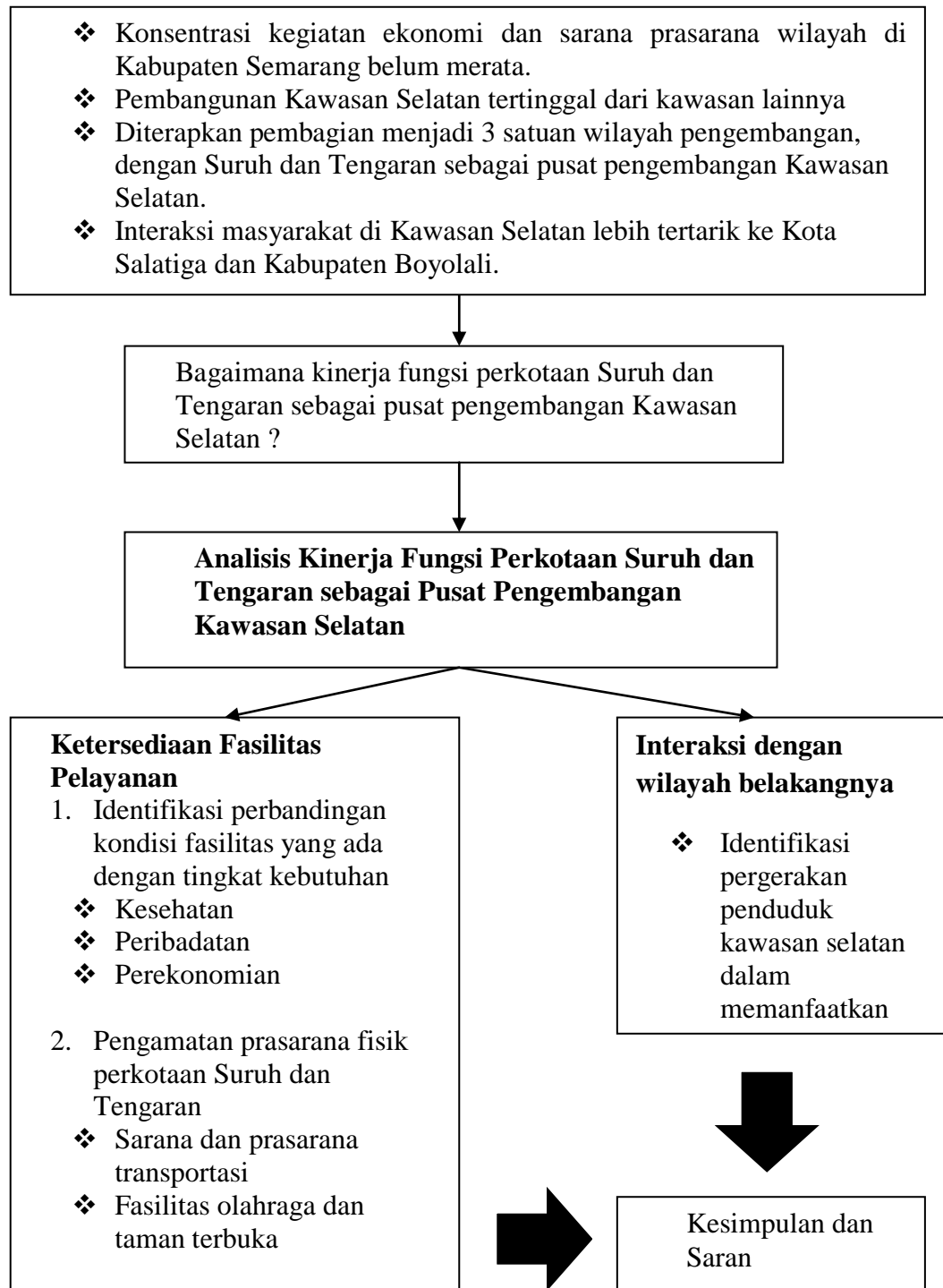
5.	<p><i>KOTA GOMBONG SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KABUPATEN KEBUMEN</i></p> <p>Disusun oleh: Haryono Wahyudi, 2004</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi peran Kota Gombong dengan melihat tipologi ekonomi dan interaksi dengan wilayah sekitarnya. 2. Mengidentifikasi wilayah pengaruh Kota Gombong. 3. Mengidentifikasi sistem kotadi Kabupaten kebumen dengan mengukur system hirarki kota. 4. Mengidentifikasi kedudukan Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan dalam perwilayahan di Kabupaten Kebumen. 	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas penduduk 2. Jarak 3. Jumlah penduduk 4. Fasilitas kota 5. Sektor ekonomi <p>Metode Analisis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode LQ 2. Model Gravitasi 3. Model Titik Henti 4. Skalogram Guttman 5. Indeks Sentralitas Terbobot 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen adalah besar karena interaksi ekonomi yang besar terhadap wilayah Kebumen bagian barat yaitu 8 kecamatan: Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah, dan Puring. 2. Fungsi Kota Gombong terhadap wilayah pengaruhnya diantaranya adalah pusat pelayanan umum dan sosial, pusat komersial dan jasa, pusat pemasaran dan regional, penyediaan dan pemrosesan produk pertanian, pusat transportasi dan komunikasi regional, pusat transformasi sosial. 3. Sistem Kota Gombong terdiri dari: Kota Gombong, Sempor, Kuwarasan, Karanganyar, Buayan, Karanggayam, Rowokele, Ayah, dan Puring.
----	--	--	---	--

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada kesenjangan antarkawasan yang terjadi di Kabupaten Semarang, sehingga memerlukan kebijakan yang tepat agar tercapai pembangunan yang lebih merata. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bappeda setempat yaitu mengurangi konsentrasi kegiatan di wilayah tertentu seperti Ungaran dan Ambarawa dengan cara mengembangkan Kawasan Selatan. Kawasan ini dipilih menjadi lokasi studi karena masih tertinggal dari kawasan lain, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pendapatan perkapita, aksesibilitas, dan faktor kelengkapan fasilitas umum.

Kawasan Selatan memiliki berbagai potensi dan kekayaan alam yang dapat mendukung pembangunan wilayah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah menetapkan perkotaan Suruh dan Tengaran sebagai pusat pengembangan di Kawasan Selatan. Adanya pusat tersebut diharapkan dapat lebih mengembangkan kawasan tersebut. Oleh karena itu kinerja pusat pengembangan kawasan perlu dikaji untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan pemerintah terhadap pengembangan wilayah. Kinerja fungsi pusat kawasan dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas pelayanan publik dan interaksi dengan wilayah belakangnya. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai (Effendi, 2006). Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana variabel-variabel yang diukur. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka aspek-aspek yang diteliti, variabel penelitian beserta definisi operasional adalah sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja Fungsi Kota

Definisi kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai dan kemampuan kerja/prestasi dari seseorang ataupun suatu hal. Dalam penelitian ini, kinerja fungsi kota diukur dengan ketersediaan fasilitas pelayanan publik seperti di bidang kesehatan, perekonomian, peribadatan, transportasi, rekreasi, dan pendidikan. Selanjutnya, kinerja fungsi kota juga diukur melalui interaksi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut.

3.1.2 Ketersediaan Fasilitas Pelayanan

Ketersediaan fasilitas pelayanan adalah kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan masyarakat, dengan variabel:

- Ketersediaan fasilitas kesehatan, merupakan indikator kinerja fungsi pusat kawasan dalam bidang kesehatan. Fasilitas yang dimaksud adalah rumah sakit,

puskesmas, puskesmas pembantu, rumah bersalin, dokter praktek dan apotek. Ketersediaan fasilitas kesehatan dinyatakan dalam jenis, jumlah dan standar yang harus dipenuhi berdasarkan rasio dengan jumlah penduduk.

- Ketersediaan fasilitas peribadatan, merupakan indikator kinerja fungsi pusat kawasan dalam bidang sosial. Fasilitas yang dimaksud tempat-tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, wihara, dan pura. Ketersediaan fasilitas peribadatan dinyatakan dalam jenis, jumlah dan standar yang harus dipenuhi berdasarkan rasio dengan jumlah penduduk.
- Ketersediaan fasilitas perekonomian, merupakan indikator kinerja fungsi pusat kawasan dalam bidang ekonomi. Fasilitas yang dimaksud adalah pasar tradisional, toko modern, bank, dan koperasi. Ketersediaan fasilitas perekonomian dinyatakan dalam jenis, jumlah dan standar yang harus dipenuhi berdasarkan rasio dengan jumlah penduduk.

3.1.3 Interaksi Spasial

Interaksi spasial adalah hubungan atau kontak yang saling mempengaruhi dan terjadi antardaerah, beserta hasil hubungannya. Dalam penelitian ini variabelnya yaitu:

- Pergerakan penduduk, diukur dengan pilihan dan tujuan masyarakat di Kawasan Selatan yaitu kecamatan Suruh, Tenganan, Bancak, Bringin, Pabelan, Susukan, Kaliwungu, Getasan dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

3.1.4 Prasarana Fisik Perkotaan

Prasarana fisik perkotaan yaitu sarana dan prasarana penunjang fungsi kota seperti di bidang transportasi, rekreasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini prasarana fisik diidentifikasi melalui kondisi terminal dan taman terbuka.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli di sini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Pengumpulan data primer bersumber dari wawancara dengan berbagai pihak seperti :

1. Komunikasi langsung dengan Kasubsie pada Bidang Perekonomian, Setda Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Komunikasi langsung dengan Kasubbid Tata Ruang, Bidang Pengembangan Wilayah, BAPPEDA Kabupaten Semarang.
3. Komunikasi langsung dengan Staf Ahli Bupati Semarang Bidang Ekonomi dan Keuangan.
4. Komunikasi langsung dengan camat dan/atau staf pihak Kecamatan Bringin, Bancak, Pabelan, Suruh, Getasan, Susukan, Kaliwungu, dan Tenganan.
5. Komunikasi personal dengan masyarakat di lokasi studi, dengan teknik wawancara.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan peneliti bersumber dari :

1. BPS Kabupaten Semarang: Kabupaten Semarang Dalam Angka (data ketersediaan fasilitas), Kecamatan-kecamatan Dalam Angka, data PDRB Kabupaten Semarang, data perkiraan PDRB dan PDRB perkapita Menurut Kecamatan di Kabupaten Semarang.
2. Bappeda Kabupaten Semarang : Peta-peta wilayah dan Perda RTRW.
3. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam wilayah studi: Data Monografi Kecamatan.
4. Sumber lain yang juga dapat dimanfaatkan sebagai data sekunder yaitu berupa studi literatur, referensi, dan artikel-artikel.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini berupa data sekunder dan data primer, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka sedangkan data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara. Adapun secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mewawancarai langsung responden yang akan dijadikan sampel yaitu masyarakat yang kebetulan ditemui di lokasi studi dan pihak pemerintah setempat untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan bantuan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap narasumber terkait

seperti Kasubsie pada Bidang Ekonomi Pemkab, Kasubbid Tata Ruang bidang Pengembangan Wilayah BAPPEDA, Staf Ahli Bupati Semarang, pihak-pihak kecamatan, dan masyarakat di lokasi studi.

2. Observasi atau metode pengamatan langsung, yaitu metode pengumpulan data melalui peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan dengan mengunjungi lokasi penelitian.
3. Metode studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari hasil publikasi lembaga-lembaga atau instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan BAPPEDA.

3.4 Metode Analisis

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan eksploratif. Metode penelitian deskriptif menurut Nazir (2003) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Langkah-langkah penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil observasi (Effendi, 2013). Data ketersediaan fasilitas pelayanan dianalisis dengan metode deskriptif.

Selanjutnya metode yang digunakan dalam menghimpun dan menganalisis data adalah metode eksploratif. Eksplorasi fisik dilakukan dengan menganalisis kondisi ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung fungsi perkotaan. Dalam penelitian ini metode eksploratif juga dimaksudkan untuk melihat interaksi keruangan masyarakat di lokasi studi. Adapun untuk menguatkan temuan dilakukan pengamatan lapangan dan wawancara seperlunya dengan staf pemerintah dan masyarakat dilapangan.

Tabel 3.1
Metode Analisis Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Teknik Analisis
1.	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan (bidang kesehatan, peribadatan, dan perekonomian)	1. Jumlah fasilitas 2. Jenis Fasilitas 3. Kebutuhan sesuai dengan standar jumlah penduduk	Deskriptif
2.	Pergerakan penduduk	Pilihan dan tujuan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas umum	Eksploratif